



**PENGARUH BELANJA PEMERINTAH DAERAH TERHADAP
KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN DI KOTA BATU
(Studi Kasus Pada Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batu 2017-2020)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**

Di susun oleh:

LINDA WULANDARI

NPM.21501082253



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
MALANG**

2022

**PENGARUH BELANJA PEMERINTAH DAERAH TERHADAP
KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN DI KOTA BATU
(Studi Kasus Pada Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batu 2017-2020)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**

Di susun oleh:

LINDA WULANDARI

NPM.21501082253



UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

MALANG

2022

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh belanja pemerintah terhadap kemiskinan dan pengangguran di kota batu dari tahun 2017 sampai 2020. Jenis metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif dengan menggunakan regresi linier sederhana yang terdiri dari uji asumsi klasik dan uji hipotesis serta diolah dengan SPSS 16.0. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa belanja pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan dan belanja pemerintah juga berpengaruh terhadap pengangguran di kota batu pada tahun 2017 – 2020.

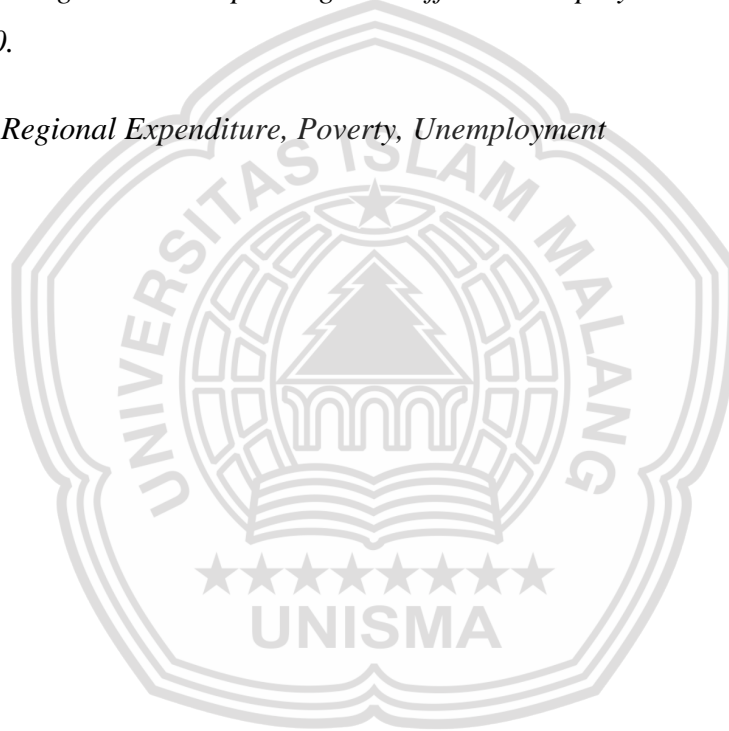
Kata Kunci : Belanja Daerah, Kemiskinan, Pengangguran



ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the effect of government spending on poverty and unemployment in Batu City from 2017 to 2020. The type of research method used is quantitative research using simple linear regression consisting of classical assumption tests and hypothesis testing and processed with SPSS 16.0. The results of this study indicate that government spending has a significant effect on poverty and government spending also affects unemployment in Batu City in 2017 – 2020.

Keywords: Regional Expenditure, Poverty, Unemployment



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pengeluaran pemerintah adalah pengeluaran pemerintah yang ditujukan untuk mendanai kegiatan pemerintah baik yang bersifat wajib maupun selektif serta pengolahannya pada bagian atau bidang tertentu. Pengeluaran tersebut dapat mendukung berbagai program dan langkah yang bertujuan untuk menstabilkan perekonomian nasional.

Pengeluaran pemerintah yang termasuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu alat kebijakan fiskal pemerintah. Pemerintah menggunakannya untuk mengontrol perekonomian negara. Belanja nasional atau yang disebut dengan belanja daerah terdiri dari anggaran pemerintah pusat, dana kompensasi, dana otonomi khusus, dan dana kompensasi (Suparmoko, 2003). Perkembangan kegiatan nasional terus meningkat dari tahun ke tahun. Semakin penting suatu negara, semakin besar pula pengeluaran nasional yang berkaitan dengan pendapatan nasional. Pengeluaran pemerintah bisa jadi "exhaustive", yaitu Pembelian barang atau jasa dalam perekonomian yang dapat dikonsumsi secara langsung atau digunakan untuk memproduksi barang lain. Selain itu, pengeluaran pemerintah dapat "dikirim" ke individu untuk tujuan sosial, bisnis sebagai subsidi, dan mungkin ke negara lain sebagai hadiah.

Pembangunan pada dasarnya adalah proses multifaset yang melibatkan perubahan struktur sosial, perubahan sikap masyarakat terhadap kehidupan, dan perubahan institusi nasional. Pembangunan juga mencakup perubahan sejauh ketimpangan pendapatan berkurang dan kemiskinan diberantas.

Masing-masing dari tiga komponen utama definisi ini sangat penting untuk diketahui sebelumnya. Artinya, 1) peningkatan produksi yang terus-menerus merupakan manifestasi atau manifestasi dari apa yang disebut pertumbuhan ekonomi, dan kemampuan untuk mensuplai berbagai jenis

komoditas secara mandiri merupakan tanda kematangan ekonomi di negara yang bersangkutan. 2) Perkembangan teknologi. Persyaratan dasar untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan adalah berkelanjutan, yang merupakan persyaratan, dan selain kemajuan teknologi, faktor lain juga diperlukan, 3) sesekali potensi pertumbuhan teknologi baru. Kelembagaan, sikap dan ideologi yang ingin dicapai. Kemiskinan merupakan masalah penting bagi setiap orang di dunia, khususnya Indonesia yang masih merupakan negara berkembang (NSB). Kemiskinan telah menjadi masalah serius di Indonesia sejak negara ini merdeka. Masalah kemiskinan sangat kompleks dari segi sosial, budaya, ekonomi dan banyak aspek lainnya. Kemiskinan di setiap negara harus dilihat sebagai masalah serius, karena banyak orang yang kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Kemiskinan Indonesia merupakan salah satu penyakit ekonomi, sehingga diperlukan suatu solusi atau kebijakan untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Masalah kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan kompleks dengan karakter yang beragam. Oleh karena itu, upaya penanggulangan kemiskinan juga harus dilaksanakan secara komprehensif dan terpadu. Istilah kemiskinan adalah ketika seorang individu atau kelompok tidak mampu memenuhi kebutuhan atau kesejahteraan finansial yang sesuai dengan standar hidup di daerah tertentu (Siregar, 2008:25).

Orang miskin tidak memiliki pekerjaan (pengangguran) dan tingkat kemiskinan, pendidikan dan kesehatan umumnya tidak memadai (Saputra, 2011: 1). Indonesia sering menghadapi pengangguran yang tinggi karena jumlah lapangan pekerjaan yang terbatas dan jumlah penduduk yang besar. Indonesia merupakan negara terpadat keempat di dunia setelah China, India dan Amerika Serikat (Sumber: Wikipedia.org).

Pengangguran adalah masalah ekonomi makro yang berdampak langsung pada masyarakat dan merupakan masalah yang paling serius. Bagi kebanyakan orang, kehilangan pekerjaan berarti penurunan standar hidup dan tekanan psikologis. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika pengangguran merupakan masalah yang sering dibahas dalam debat politik, dan politisi

berpendapat bahwa tindakan yang mereka berikan membantu menciptakan kesempatan kerja (Mankiw, 2006:15).

Di setiap negara, selalu ada intervensi pemerintah atau intervensi ekonomi. Dalam sistem ekonomi negara Anda, Anda hanya bertindak sebagai "penilai" atau "petugas polisi", yang satu-satunya fungsinya adalah membuat undang-undang, sebagai perantara jika terjadi masalah, atau panik. Intervensi negara dalam perekonomian jelas dibenarkan dan tidak dapat dicegah. Tidak ada perekonomian, termasuk negara kapitalis dan negara maju, tanpa campur tangan pemerintah. Ada tingkatan yang berbeda, di mana pemerintah terlibat erat dalam perekonomian di beberapa negara, sementara intervensi pemerintah dalam perekonomian relatif terbatas di negara lain (Dumairy, 1996: 157).

Dari penjelasan di atas, dapat dijelaskan bahwa pengeluaran pemerintah merupakan faktor dalam mengatasi kemiskinan di Jepang. Pemerintah telah mencoba dan menerapkan kebijakan atau program pengentasan kemiskinan yang berbeda dengan pengeluaran yang berbeda. Pemerintah memiliki BOS untuk pendidikan (bantuan manajemen sekolah), Ruskin (beras untuk orang miskin), BLT (bantuan tunai langsung), dan banyak program pemerintah lainnya yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan di tanah air.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulisan tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah Terhadap Kemiskinan dan Pengangguran di Kota Batu Tahun 2017-2020”

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah pengeluaran pemerintah daerah mempengaruhi kemiskinan di Kota Batu Tahun 2017-2020?
2. Apakah belanja pemerintah daerah berpengaruh terhadap Pengangguran di Kota Batu tahun 2017 – 2020?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

2.1.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh belanja pemerintah daerah terhadap kemiskinan di Kota Batu tahun 2017 – 2020?
2. Untuk mengetahui pengaruh belanja pemerintah daerah terhadap Pengangguran di Kota Batu tahun 2017 – 2020?

2.1.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara langsung maupun tidak langsung kepada para pihak melalui penelitian ini, antara lain::

3.1.2.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian berikutnya yang berhubungan dengan masalah pendapatan pemerintah daerah, kemiskinan dan pengangguran.

3.1.2.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan sebagai masukan bagi pemerintah daerah khususnya terhadap instansi-instansi terkait.

BAB V

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan analisis yang sudah dilakukan, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Belanja pemerintah mempengaruhi kemiskinan di Kota Batu. Semakin besar belanja pemerintah maka semakin tinggi pula kemiskinan di Kota Batu.
- b. Belanja pemerintah mempengaruhi pengangguran di Kota Batu. Semakin besar belanja pemerintah maka semakin tinggi pula pengangguran di Kota Batu.
- c. Diantara kedua variabel tersebut, yaitu kemiskinan dan pengangguran, ternyata tingkat pengangguran yang mendapat pengaruh paling besar dari belanja pemerintah.

1.2 Keterbatasan

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa keterbatasan yang dapat mempengaruhi hasil akhir penelitian ini. Keterbatasan tersebut meliputi jumlah variabel dengan hanya satu variabel independen dan dua variabel dependen, dan ukuran sampel dalam penelitian ini terbatas yaitu hanya menggunakan data variabel dari tahun 2017-2020. Oleh karena itu, diharapkan penelitian selanjutnya dapat diteliti dengan menggunakan lebih banyak variabel. Karena keterbatasan waktu penelitian, penulis membatasi penelitian ini pada kantor Badan Pusat Statistik kota Batu. Diharapkan penelitian lebih lanjut dapat dilakukan di berbagai kantor BPS di Malang Raya.

1.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian serta kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini. Maka terdapat beberapa saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan penelitian selanjutnya yaitu:

1. Dengan terdapatnya pengaruh signifikan antara belanja pemerintah terhadap pengangguran di Kota Batu, pemerintah perlu mengurangi pengangguran melalui kebijakan fiskal yaitu dengan mengembangkan atau meningkatkan belanja pemerintah yang menciptakan pekerjaan baru.
2. Dengan terdapatnya pengaruh signifikan antara belanja pemerintah terhadap tingkat kemiskinan di Kota Batu, pemerintah harus memperhatikan alokasi dari belanja pemerintah agar bisa digunakan sebaik mungkin untuk kepentingan publik dan bisa membantu perekonomian masyarakat, sehingga bisa mengurangi angka kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, L. (2015). Ekonomi Pembangunan dan Pembangunan Ekonomi Transportasi. In *Ekonomi Pembangunan Berkelanjutan* (Vol. 05, Issue 01).
- Astuti, I. A. P., & Astika, I. B. P. (2016). Pengaruh Jumlah Penduduk, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 17(3).
- Dumairy, D. (1996). *Perekonomian Indonesia*.
- Fasholla, R. T. (2018). *Pengaruh Belanja Daerah, Jumlah Penduduk, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Jumlah Kemiskinan di Kabupaten Cilacap Periode tahun 2011–2016 (Studi Kasus di 24 Kecamatan di Kabupaten Cilacap Periode 2011-2016)*.
- Kaharudin, R., Kumenaung, A. G., & Niode, A. O. (2019). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran Dan Kemiskinan (Studi Kasus Pada Kota Manado Tahun 2001-2017). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 19(04).
- Kuncoro, M. (2006). *Ekonomi Pembangunan (Teori, Masalah, Dan kebijakan)*, edisi Ke empat. UPP STIM YKPN: Yogyakarta.
- Kuncoro, M. (2009). *Ekonomika indonesia: Dinamika lingkungan bisnis di tengah krisis global*. UPP STIM YKPN.
- Mankiw Gregory, N. (2006). *Principles of microeconomics*. Thompson South-Western.
- Mardiana, M., Militina, T., & Utary, A. R. (2018). Analisis pengaruh pengeluaran pemerintah daerah sektor pendidikan dan kesehatan serta infrastruktur terhadap tingkat pengangguran serta tingkat kemiskinan. *Inovasi*, 13(1), 50–60.
- Mhd, I. N. (2020). *analisis pengaruh pengeluaran pemerintah, pertumbuhan ekonomi dan pengangguran terhadap angka kemiskinan di pulau sumatera*. Universitas Andalas.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan R&D)*. Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan R&D)*. In *Metodelogi Penelitian*. In *Metodelogi Penelitian*.

Sukirno, S. (1981). *Pembangunan Ekonomi. Proses Masalah Dan Dasar Kebijakan, Borta Gorat, Medan.*

Sukirno, S. (2004). *Makroekonomi* (Edisi ke 3).

Suparmoko, M. (2003). *Keuangan Negara, Dalam Teori dan Praktek, Edisi 5. Yogyakarta: BPFE.*

Todaro, M. (1989). *Economic development in the third world countries. Translated by Gholam Ali Farjadi.*

Todaro, M. P. (1999). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga I.* Erlangga.

Waruwu, S. J. A. (2016). *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Belanja Pemerintah, dan Investasi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia tahun 1995-2014. Skripsi, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.*

